

RUDYCT ACADEMIC SERIES 2026



Ketika Ekonomi Tumbuh tetapi Rakyat Bertanya: Di Mana Kesejahteraan?

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan pemerataan kesejahteraan. Infografik ini menyoroti kesenjangan antara angka makroekonomi dan realitas hidup masyarakat.



Oleh:
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

 www.rudyc.com/cv.pdf

 IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

ISU KUNCI

1



Pertumbuhan ekonomi $\neq$ kesejahteraan merata

2



Daya beli masyarakat masih tertekan

3



Lapangan kerja berkualitas belum merata

4



Ketimpangan wilayah dan pendapatan

5



Harga kebutuhan pokok menjadi beban rumah tangga

6



Pertanyaan utama: siapa menikmati hasil pertumbuhan?

FOKUS BAHASAN



pertumbuhan



distribusi



daya beli



ketimpangan



pekerjaan



kesejahteraan



“ Ukuran sejati keberhasilan ekonomi adalah ketika setiap warga negara merasa hidup lebih baik hari ini daripada kemarin. ”

Ketika Ekonomi Tumbuh tetapi Rakyat Bertanya: Di Mana Kesejahteraan?

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

RudyCT Academic Series 2026

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi sering dipakai sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, namun pertumbuhan Produk Domestik Bruto tidak selalu identik dengan meningkatnya kesejahteraan yang dirasakan rumah tangga. Artikel ini membahas paradoks ketika indikator makro membaik sementara sebagian masyarakat tetap menghadapi tekanan biaya hidup, kualitas pekerjaan yang rendah, pendapatan riil yang stagnan, ketimpangan kesempatan, akses layanan publik yang tidak merata, serta kerentanan terhadap guncangan. Dengan menggunakan kerangka pertumbuhan inklusif, kapabilitas, distribusi pendapatan, kualitas pekerjaan, dan ekonomi kesejahteraan, artikel menelaah kondisi Indonesia kontemporer. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, tetapi Gini ratio Maret 2026 masih 0,368 dan rata-rata upah buruh Mei 2026 sebesar Rp3,39 juta. Data tersebut menunjukkan kemajuan yang nyata sekaligus alasan mengapa persepsi kesejahteraan dapat berbeda dari statistik agregat. Argumen utama artikel ini adalah bahwa pembangunan yang berhasil harus dinilai bukan hanya dari seberapa besar ekonomi tumbuh, melainkan dari kualitas pertumbuhan, distribusi manfaat, keamanan ekonomi rumah tangga, mobilitas sosial, mutu pekerjaan, keterjangkauan layanan dasar, serta kemampuan masyarakat menjalani kehidupan yang bernilai. Artikel menawarkan agenda kebijakan yang menghubungkan produktivitas, upah, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, reformasi fiskal, tata kelola, penguatan UMKM, dan transformasi digital agar pertumbuhan lebih terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi; kesejahteraan; ketimpangan; upah riil; kualitas pekerjaan; kelas menengah; kemiskinan; pertumbuhan inklusif; produktivitas; Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Indonesia memperlihatkan paradoks pembangunan yang lazim ditemukan di banyak negara berkembang berpendapatan menengah: pertumbuhan makro cukup stabil, kemiskinan turun, tetapi rasa aman ekonomi rumah tangga tidak selalu meningkat dengan kecepatan yang sama. Ketika lapangan kerja masih didominasi sektor produktivitas rendah, biaya hidup strategis meningkat, dan akses terhadap aset serta layanan berkualitas timpang, manfaat pertumbuhan menjadi tidak merata.

Pertanyaan kebijakan yang relevan bukan apakah pertumbuhan penting, melainkan bagaimana kualitas dan distribusi pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan yang berasal dari produktivitas, manufaktur bernilai tambah, jasa modern, agroindustri, ekonomi hijau, dan digitalisasi yang inklusif cenderung memberi fondasi lebih kuat bagi kesejahteraan dibanding pertumbuhan yang sangat bergantung pada rente, komoditas, atau proyek padat modal dengan keterkaitan domestik terbatas.

Artikel ini mengusulkan agenda integratif: memperbanyak pekerjaan produktif, mendorong hubungan produktivitas-upah, menurunkan biaya hidup melalui layanan publik, memperkuat perlindungan sosial adaptif, membangun mobilitas sosial, memperluas akses aset, memperkuat UMKM, mengelola AI secara inklusif, dan meningkatkan kualitas tata kelola. Target akhirnya adalah menjadikan pertumbuhan terasa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya terlihat dalam statistik triwulanan.

Potret Singkat Indonesia 2025-2026

Indikator	Nilai	Makna untuk Kesejahteraan
Pertumbuhan ekonomi 2025	5,11%	Menunjukkan ekspansi output nasional, tetapi belum menggambarkan distribusi manfaat.
PDB per kapita 2025	Rp83,7 juta	Rata-rata nasional; tidak sama dengan pendapatan yang diterima setiap orang.
Kemiskinan Maret 2026	8,07% / 22,93 juta orang	Menurun, tetapi kelompok rentan di atas garis kemiskinan tetap besar.
Gini ratio Maret 2026	0,368	Ketimpangan tetap perlu diperhatikan walaupun lebih rendah dari Maret 2025.
TPT Mei 2026	4,65%	Penyerapan kerja cukup baik, tetapi kualitas dan produktivitas pekerjaan perlu dinilai.
Rata-rata upah buruh Mei 2026	Rp3,39 juta/bulan	Menjadi pengingat pentingnya daya beli, biaya hidup, dan variasi upah regional.

1. Pendahuluan: Pertumbuhan yang Dipertanyakan

Paradoks indikator dan pengalaman sehari-hari

Pertumbuhan ekonomi dapat terlihat meyakinkan di layar statistik, tetapi warga menilai ekonomi dari pengalaman yang jauh lebih konkret: apakah penghasilan cukup sampai akhir bulan, apakah biaya pangan dan pendidikan terjangkau, apakah pekerjaan memberi kepastian, dan apakah masa depan anak terlihat lebih baik. Karena itu, ketika angka PDB meningkat sementara rumah tangga tetap merasa tertekan, pertanyaan 'di mana kesejahteraan?' bukan penolakan terhadap statistik, melainkan permintaan agar statistik dibaca bersama realitas sosial. PDB mengukur nilai tambah yang dihasilkan ekonomi, bukan langsung tingkat rasa aman, kepuasan, kesehatan, atau kualitas pekerjaan setiap orang. Dua hal dapat benar sekaligus: ekonomi tumbuh dan sebagian masyarakat belum merasakan manfaatnya secara proporsional.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan

household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'paradoks indikator dan pengalaman sehari-hari' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Indonesia dalam konteks 2025-2026

BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025 dengan PDB per kapita sekitar Rp83,7 juta. Pada saat yang sama, kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Ini merupakan kemajuan yang penting. Namun, Gini ratio Maret 2026 sebesar 0,368 menunjukkan distribusi pengeluaran tetap timpang, sedangkan rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sebesar Rp3,39 juta menggambarkan keterbatasan daya beli bagi banyak pekerja, terutama di wilayah perkotaan dengan biaya hidup tinggi. Gambaran ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan harus dibaca sebagai proses distribusi, bukan hanya penjumlahan output.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dari sisi perilaku, persepsi kesejahteraan juga dibentuk oleh perbandingan sosial dan ekspektasi. Masyarakat tidak hanya membandingkan pendapatan hari ini dengan kemarin, tetapi juga dengan kelompok lain, dengan standar kehidupan yang terlihat di media sosial, dan dengan harapan yang dibentuk oleh pendidikan serta urbanisasi. Ketika aspirasi tumbuh lebih cepat daripada peluang, rasa ketertinggalan dapat meningkat walaupun pendapatan absolut naik. Fenomena ini menjelaskan mengapa keberhasilan makro kadang tidak segera meningkatkan kepuasan publik.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'Indonesia dalam konteks 2025-2026' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Tujuan artikel

Artikel ini bertujuan menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis bertransformasi menjadi kesejahteraan yang dirasakan luas. Analisis bergerak dari konsep dasar ekonomi kesejahteraan

menuju isu upah, produktivitas, pekerjaan informal, biaya hidup, kelas menengah, ketimpangan spasial, layanan publik, perlindungan sosial, hingga transformasi digital dan AI. Pendekatan ini penting karena kebijakan yang hanya mengejar angka agregat dapat kehilangan dimensi manusia, sedangkan kebijakan yang semata-mata populis tanpa basis produktivitas juga sulit berkelanjutan. Titik temunya adalah pertumbuhan berkualitas: pertumbuhan yang menciptakan nilai tambah tinggi, pekerjaan produktif, ruang fiskal sehat, dan distribusi kesempatan yang adil.

Dari sisi perilaku, persepsi kesejahteraan juga dibentuk oleh perbandingan sosial dan ekspektasi. Masyarakat tidak hanya membandingkan pendapatan hari ini dengan kemarin, tetapi juga dengan kelompok lain, dengan standar kehidupan yang terlihat di media sosial, dan dengan harapan yang dibentuk oleh pendidikan serta urbanisasi. Ketika aspirasi tumbuh lebih cepat daripada peluang, rasa ketertinggalan dapat meningkat walaupun pendapatan absolut naik. Fenomena ini menjelaskan mengapa keberhasilan makro kadang tidak segera meningkatkan kepuasan publik.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'tujuan artikel' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

2. PDB: Penting, tetapi Bukan Seluruh Cerita

Apa yang diukur PDB

Produk Domestik Bruto menghitung nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian. PDB sangat penting karena memberi gambaran kapasitas produksi, dinamika sektor, basis pajak, kemampuan investasi, dan ketahanan fiskal. Tanpa pertumbuhan, ruang untuk menaikkan pendapatan, membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan menyempit. Karena itu kritik terhadap PDB tidak berarti PDB tidak relevan. Persoalannya muncul ketika PDB dipakai sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan dan dijadikan substitusi bagi indikator sosial yang berbeda sifatnya.

Dari sisi perilaku, persepsi kesejahteraan juga dibentuk oleh perbandingan sosial dan ekspektasi. Masyarakat tidak hanya membandingkan pendapatan hari ini dengan kemarin, tetapi juga dengan kelompok lain, dengan standar kehidupan yang terlihat di media sosial, dan dengan harapan yang dibentuk oleh pendidikan serta urbanisasi. Ketika aspirasi tumbuh lebih cepat daripada peluang, rasa ketertinggalan dapat meningkat walaupun pendapatan absolut naik. Fenomena ini menjelaskan mengapa keberhasilan makro kadang tidak segera meningkatkan kepuasan publik.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan

reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'apa yang diukur pdb' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Rata-rata menyembunyikan distribusi

PDB per kapita adalah rata-rata. Jika pendapatan dan aset terkonsentrasi, rata-rata dapat meningkat tanpa perubahan setara pada median pendapatan rumah tangga. Analogi sederhananya: jika sepuluh orang berada dalam satu ruangan dan satu orang memperoleh kenaikan pendapatan sangat besar, pendapatan rata-rata ruangan dapat melonjak walaupun sembilan orang lain tidak mengalami peningkatan. Dalam perekonomian nyata, konsentrasi keuntungan pada sektor padat modal atau pada kelompok pemilik aset dapat mendorong PDB tanpa menghasilkan perluasan pendapatan buruh dengan kecepatan yang sama.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'rata-rata menyembunyikan distribusi' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Dari produksi ke kapabilitas

Amartya Sen menggeser fokus pembangunan dari sekadar pendapatan menuju kapabilitas, yakni kebebasan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai bermakna. Dalam kerangka ini, dua rumah tangga dengan pendapatan yang sama dapat memiliki tingkat kesejahteraan berbeda jika salah satunya harus menanggung biaya kesehatan tinggi, tinggal jauh dari sekolah bermutu, atau tidak memiliki transportasi yang aman. Pertumbuhan ekonomi menjadi sarana untuk memperluas kapabilitas, bukan tujuan akhir. Ukuran keberhasilan harus mencakup kesehatan, pendidikan, keamanan, partisipasi, lingkungan, dan kualitas institusi.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'dari produksi ke kapabilitas' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

3. Pertumbuhan Inklusif dan Kualitas Pertumbuhan

Pertumbuhan yang menciptakan kesempatan

Pertumbuhan inklusif menekankan perluasan kesempatan ekonomi bagi kelompok luas, bukan sekadar redistribusi setelah pertumbuhan terjadi. Dalam pendekatan ini, struktur produksi harus mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memberi jalur mobilitas sosial. Industri manufaktur, jasa modern, ekonomi kreatif, agroindustri, logistik, pariwisata berkualitas, dan ekonomi digital dapat menjadi mesin kesempatan apabila terhubung dengan keterampilan masyarakat dan ekosistem UMKM. Tanpa hubungan tersebut, pertumbuhan mudah menjadi enclave: nilai tambah tinggi muncul, tetapi keterkaitannya dengan pendapatan masyarakat setempat lemah.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'pertumbuhan yang menciptakan kesempatan' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Kualitas lebih penting daripada angka tunggal

Dua negara dapat sama-sama tumbuh lima persen tetapi menghasilkan pengalaman sosial yang sangat berbeda. Negara pertama tumbuh melalui peningkatan produktivitas dan ekspansi pekerjaan formal bergaji layak. Negara kedua tumbuh karena ledakan komoditas atau proyek padat modal yang

manfaatnya terkonsentrasi. Angka pertumbuhan sama, tetapi kualitasnya berbeda. Karena itu evaluasi pembangunan perlu menanyakan sumber pertumbuhan, siapa yang menerima pendapatan, jenis pekerjaan yang tercipta, dampak lingkungan, serta kemampuan pertumbuhan bertahan tanpa ketergantungan berlebihan pada utang, subsidi, atau rente sumber daya.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'kualitas lebih penting daripada angka tunggal' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Produktivitas dan distribusi

Pertumbuhan kesejahteraan jangka panjang memerlukan produktivitas, tetapi kenaikan produktivitas tidak otomatis mengalir ke upah. Daya tawar pekerja, struktur pasar, teknologi, regulasi, pendidikan, dan tata kelola perusahaan memengaruhi pembagian surplus produktivitas. Jika produktivitas naik sementara kompensasi tenaga kerja tertahan, jurang antara output dan kesejahteraan pekerja melebar. Di sinilah kebijakan pasar kerja, kompetisi usaha, penguatan keterampilan, dan tata kelola korporasi menjadi penting agar pertumbuhan produktivitas diterjemahkan menjadi pendapatan yang lebih baik.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Dari sisi perilaku, persepsi kesejahteraan juga dibentuk oleh perbandingan sosial dan ekspektasi. Masyarakat tidak hanya membandingkan pendapatan hari ini dengan kemarin, tetapi juga dengan kelompok lain, dengan standar kehidupan yang terlihat di media sosial, dan dengan harapan yang dibentuk oleh pendidikan serta urbanisasi. Ketika aspirasi tumbuh lebih cepat daripada peluang, rasa ketertinggalan dapat meningkat walaupun pendapatan absolut naik. Fenomena ini menjelaskan mengapa keberhasilan makro kadang tidak segera meningkatkan kepuasan publik.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'produktivitas dan distribusi' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa

perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

4. Upah, Pendapatan Riil, dan Daya Beli

Upah nominal bukan upah riil

Kesejahteraan pekerja ditentukan oleh daya beli, bukan semata angka gaji nominal. Ketika gaji naik lima persen tetapi biaya pangan, sewa, transportasi, pendidikan, dan kesehatan naik dengan tekanan yang dirasakan lebih besar, pekerja tetap dapat merasa lebih miskin. Inflasi resmi adalah rata-rata sekeranjang barang, sedangkan setiap rumah tangga memiliki keranjang konsumsi yang berbeda. Rumah tangga berpendapatan rendah mengalokasikan porsi lebih besar untuk pangan dan energi, sehingga mereka lebih sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Inilah sebabnya persepsi inflasi dapat lebih tinggi daripada angka agregat.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'upah nominal bukan upah riil' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Rata-rata upah dan realitas heterogen

Rata-rata upah buruh Mei 2026 sebesar Rp3,39 juta berguna sebagai indikator nasional, tetapi tidak menggambarkan variasi sektor dan wilayah. Upah pekerja formal di jasa keuangan, pertambangan, atau teknologi dapat jauh di atas pekerja ritel, akomodasi, jasa personal, atau manufaktur padat karya. Di wilayah metropolitan, pengeluaran perumahan dan transportasi dapat menyerap porsi besar pendapatan. Di pedesaan, tantangan berbeda: pendapatan mungkin lebih rendah dan volatil karena musim, harga komoditas, serta akses pasar. Kebijakan kesejahteraan harus peka pada variasi tersebut.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan

reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'rata-rata upah dan realitas heterogen' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Living wage dan produktivitas

Konsep living wage memperluas pembahasan dari upah minimum ke pendapatan yang memungkinkan kehidupan layak. Namun kebijakan upah harus ditempatkan bersama produktivitas agar tidak memicu tekanan biaya yang berlebihan pada perusahaan berproduktivitas rendah. Solusinya bukan menahan upah terus-menerus, melainkan menaikkan produktivitas melalui teknologi tepat guna, manajemen, pelatihan, akses pembiayaan, logistik, dan skala usaha. Produktivitas yang lebih tinggi menciptakan ruang ekonomi untuk upah lebih baik tanpa kehilangan daya saing.

Dari sisi perilaku, persepsi kesejahteraan juga dibentuk oleh perbandingan sosial dan ekspektasi. Masyarakat tidak hanya membandingkan pendapatan hari ini dengan kemarin, tetapi juga dengan kelompok lain, dengan standar kehidupan yang terlihat di media sosial, dan dengan harapan yang dibentuk oleh pendidikan serta urbanisasi. Ketika aspirasi tumbuh lebih cepat daripada peluang, rasa ketertinggalan dapat meningkat walaupun pendapatan absolut naik. Fenomena ini menjelaskan mengapa keberhasilan makro kadang tidak segera meningkatkan kepuasan publik.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'living wage dan produktivitas' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

5. Kualitas Pekerjaan: Bekerja Belum Tentu Sejahtera

Pengangguran rendah tidak cukup

Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen menunjukkan pasar kerja relatif mampu menyerap tenaga kerja. Namun indikator ini belum menangkap kualitas pekerjaan. Seseorang dapat dikategorikan bekerja walaupun jam kerja sedikit, pendapatan rendah, atau pekerjaannya sangat tidak stabil. World Bank pada 2026 menyoroti persoalan kualitas pekerjaan, termasuk tingginya underemployment dan melemahnya pendapatan riil untuk kelompok pekerja menengah dan terampil dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu agenda ketenagakerjaan harus berpindah dari sekadar job creation menuju good jobs.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dari sisi perilaku, persepsi kesejahteraan juga dibentuk oleh perbandingan sosial dan ekspektasi. Masyarakat tidak hanya membandingkan pendapatan hari ini dengan kemarin, tetapi juga dengan kelompok lain, dengan standar kehidupan yang terlihat di media sosial, dan dengan harapan yang dibentuk oleh pendidikan serta urbanisasi. Ketika aspirasi tumbuh lebih cepat daripada peluang, rasa ketertinggalan dapat meningkat walaupun pendapatan absolut naik. Fenomena ini menjelaskan mengapa keberhasilan makro kadang tidak segera meningkatkan kepuasan publik.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'pengangguran rendah tidak cukup' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Informalitas dan kerentanan

Pekerjaan informal memberi fleksibilitas dan menjadi penyangga ekonomi, tetapi sering disertai perlindungan yang lemah: tidak ada kontrak jelas, jaminan sosial terbatas, akses kredit rendah, dan pendapatan sangat fluktuatif. Pedagang kecil, pekerja platform, pekerja rumah tangga, pengemudi, petani gurem, dan pekerja keluarga dapat produktif tetapi rentan. Strategi formalitas tidak boleh berarti birokratisasi yang membebani. Yang dibutuhkan adalah formalisasi bertahap melalui identitas usaha, pembukuan sederhana, kepesertaan jaminan sosial, akses pembiayaan, dan digitalisasi transaksi.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa

menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'informalitas dan kerentanan' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Good jobs sebagai jembatan kelas menengah

Kelas menengah tumbuh ketika ekonomi menyediakan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan cukup tinggi, stabil, dan memungkinkan akumulasi aset. Pekerjaan semacam itu biasanya terkait dengan produktivitas, keterampilan, formalitas, dan organisasi yang mampu membayar kompensasi kompetitif. Jika pertumbuhan menghasilkan banyak pekerjaan tetapi mayoritas berupah rendah dan tanpa jalur karier, mobilitas sosial melambat. Pekerja tetap sibuk, tetapi masa depan terasa tidak pasti. Pertumbuhan yang berkualitas harus memperbesar proporsi pekerjaan yang memberi kesempatan belajar, perlindungan, dan kemajuan pendapatan.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'good jobs sebagai jembatan kelas menengah' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

6. Kemiskinan Turun, Kerentanan Tetap Besar

Kemajuan yang patut diakui

Penurunan kemiskinan nasional menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 merupakan capaian penting. Sekitar 22,93 juta orang masih berada di bawah garis kemiskinan, tetapi tren menurun menunjukkan efek kombinasi pertumbuhan, perlindungan sosial, stabilitas harga, dan kebijakan publik. Pengakuan atas capaian ini penting agar analisis tidak jatuh pada narasi bahwa tidak ada kemajuan. Namun kebijakan juga perlu melihat kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, karena satu guncangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga pangan dapat mendorong mereka kembali jatuh.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'kemajuan yang patut diakui' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Garis kemiskinan dan pengalaman hidup

Garis kemiskinan Maret 2026 sebesar sekitar Rp669 ribu per kapita per bulan adalah alat statistik untuk mengidentifikasi kelompok miskin berdasarkan kebutuhan dasar, bukan definisi tentang kehidupan nyaman atau kelas menengah. Sebuah keluarga dapat berada di atas garis kemiskinan namun tetap hidup dengan anggaran sangat sempit. Mereka mungkin tidak tergolong miskin secara statistik, tetapi belum memiliki tabungan darurat, asuransi memadai, rumah layak, atau akses pendidikan berkualitas. Ruang antara kemiskinan dan keamanan inilah yang sering menjadi sumber keresahan sosial.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'garis kemiskinan dan pengalaman hidup' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Social protection sebagai investasi

Perlindungan sosial sebaiknya dipahami bukan hanya sebagai bantuan konsumsi, melainkan sebagai investasi dalam ketahanan rumah tangga. Program yang baik mencegah anak putus sekolah, menjaga akses kesehatan, mengurangi penjualan aset produktif saat krisis, dan memberi kesempatan pekerja mencari pekerjaan yang lebih sesuai. Tantangannya adalah akurasi data, integrasi program, ketepatan sasaran, mekanisme graduasi, dan pengurangan exclusion error. Sistem perlindungan sosial adaptif perlu mampu memperluas dukungan secara cepat ketika terjadi bencana, guncangan harga, atau kehilangan pekerjaan massal.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'social protection sebagai investasi' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

7. Ketimpangan: Siapa Menikmati Pertumbuhan?

Membaca Gini ratio

Gini ratio Indonesia sebesar 0,368 pada Maret 2026 menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang masih berarti. Nilai ini turun dibanding Maret 2025, tetapi naik dibanding September 2025. Pesan kebijakannya adalah ketimpangan bersifat dinamis dan dapat membaik atau memburuk tergantung harga aset, pendapatan kerja, transfer sosial, serta peluang ekonomi. Ketimpangan yang terlalu tinggi dapat merusak kohesi sosial, mengurangi mobilitas, dan membuat pertumbuhan kurang efektif menurunkan kemiskinan.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme

jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'membaca gini ratio' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Ketimpangan aset lebih dalam daripada konsumsi

Data pengeluaran cenderung menunjukkan ketimpangan lebih rendah daripada data kekayaan. Kepemilikan rumah, tanah, saham, usaha, dan aset finansial sangat menentukan ketahanan serta kemampuan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan. Ketika harga aset naik, pemilik aset menerima capital gain sementara rumah tangga tanpa aset tertinggal. Karena itu kebijakan perumahan, inklusi keuangan, reforma agraria yang produktif, kepemilikan saham karyawan, dan akses pembiayaan usaha memiliki dimensi distribusi yang penting.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'ketimpangan aset lebih dalam daripada konsumsi' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Kesempatan yang tidak setara

Ketimpangan paling problematis bukan hanya perbedaan hasil, tetapi perbedaan kesempatan. Anak dari keluarga berpendapatan tinggi lebih mungkin mendapat sekolah berkualitas, koneksi, nutrisi baik, akses internet, dan lingkungan yang aman. Jika asal keluarga terlalu menentukan hasil ekonomi masa depan, meritokrasi menjadi lemah. Kebijakan yang serius tentang kesejahteraan harus memutus transmisi ketimpangan antargenerasi melalui pendidikan usia dini, kesehatan ibu-anak, sekolah bermutu, beasiswa, transportasi, dan akses digital.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'kesempatan yang tidak setara' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

8. Kelas Menengah di Bawah Tekanan

Mengapa kelas menengah penting

Kelas menengah bukan hanya kategori pendapatan. Ia merupakan fondasi stabilitas sosial, basis pajak, sumber konsumsi, kewirausahaan, dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang baik. Ketika kelas menengah berkembang, masyarakat cenderung memiliki lebih banyak kapasitas menabung, berinvestasi pada pendidikan, membeli rumah, dan membangun usaha. Sebaliknya, ketika pendapatan riil stagnan dan biaya hidup meningkat, kelompok ini dapat merasa mengalami downward mobility meskipun belum masuk kategori miskin.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'mengapa kelas menengah penting' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Tekanan biaya perumahan, pendidikan, kesehatan

Tiga pengeluaran yang paling menentukan rasa sejahtera kelas menengah adalah perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Ketiganya bersifat jangka panjang dan sulit dipangkas tanpa mengurangi kualitas hidup. Harga rumah yang jauh lebih cepat daripada pendapatan membuat generasi muda menunda kepemilikan rumah. Biaya pendidikan privat meningkat ketika keluarga menilai layanan publik belum cukup memenuhi harapan. Pengeluaran kesehatan dapat menjadi bencana finansial jika perlindungan tidak memadai. Karena itu agenda kelas menengah membutuhkan kebijakan biaya hidup, bukan hanya pertumbuhan pendapatan.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa

menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'tekanan biaya perumahan, pendidikan, kesehatan' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Dari konsumsi ke keamanan ekonomi

Indikator kesejahteraan kelas menengah perlu memasukkan financial resilience: berapa bulan rumah tangga dapat bertahan tanpa pendapatan, seberapa besar beban cicilan, apakah memiliki asuransi, dan apakah mampu membiayai pendidikan anak tanpa utang berlebihan. Rumah tangga dengan pendapatan relatif tinggi tetapi tanpa tabungan dan dengan cicilan besar dapat lebih rentan daripada yang pendapatannya sedikit lebih rendah namun memiliki aset dan biaya hidup terkendali. Kebijakan harus memperhatikan kualitas neraca rumah tangga, bukan hanya arus pendapatan.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'dari konsumsi ke keamanan ekonomi' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

9. Ketimpangan Wilayah dan Ruang Ekonomi

Jawa dan konsentrasi ekonomi

Pada 2025, Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari separuh PDB. Konsentrasi ini mencerminkan aglomerasi industri, infrastruktur, pasar, perguruan tinggi, dan layanan profesional. Aglomerasi menghasilkan efisiensi, tetapi juga memperlebar kesenjangan dengan wilayah yang jauh dari pusat produksi. Ketika kesempatan pendidikan dan pekerjaan berkualitas terkonsentrasi, migrasi menjadi strategi rumah tangga, tetapi kota-kota besar kemudian menghadapi tekanan perumahan, kemacetan, dan layanan publik.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Dari sisi perilaku, persepsi kesejahteraan juga dibentuk oleh perbandingan sosial dan ekspektasi. Masyarakat tidak hanya membandingkan pendapatan hari ini dengan kemarin, tetapi juga dengan kelompok lain, dengan standar kehidupan yang terlihat di media sosial, dan dengan harapan yang dibentuk oleh pendidikan serta urbanisasi. Ketika aspirasi tumbuh lebih cepat daripada peluang, rasa ketertinggalan dapat meningkat walaupun pendapatan absolut naik. Fenomena ini menjelaskan mengapa keberhasilan makro kadang tidak segera meningkatkan kepuasan publik.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'jawa dan konsentrasi ekonomi' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Desentralisasi dan kapasitas daerah

Desentralisasi memberi ruang besar bagi pemerintah daerah untuk membentuk kualitas kesejahteraan melalui pendidikan, kesehatan, perizinan, infrastruktur lokal, transportasi, dan lingkungan. Namun kapasitas fiskal dan kelembagaan sangat bervariasi. Daerah kaya sumber daya belum tentu memiliki indikator sosial terbaik apabila rente tidak dikonversi menjadi modal manusia dan infrastruktur publik. Sebaliknya, daerah dengan sumber daya terbatas dapat berkembang cepat jika tata kelola, pendidikan, dan iklim usahanya kuat.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan

tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'desentralisasi dan kapasitas daerah' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Konektivitas sebagai pemerataan kesempatan

Jalan, pelabuhan, internet, listrik, transportasi publik, dan logistik bukan hanya proyek fisik; semuanya mengubah harga relatif dan akses masyarakat terhadap peluang. Petani yang terhubung ke pasar memperoleh posisi tawar lebih baik, siswa yang memiliki internet berkualitas mengakses sumber belajar lebih luas, dan UMKM dapat menjual ke konsumen di luar daerah. Infrastruktur yang pro-kesejahteraan harus dinilai dari pemanfaatannya, keterjangkauannya, dan kemampuan mendorong aktivitas produktif lokal.

Dari sisi perilaku, persepsi kesejahteraan juga dibentuk oleh perbandingan sosial dan ekspektasi. Masyarakat tidak hanya membandingkan pendapatan hari ini dengan kemarin, tetapi juga dengan kelompok lain, dengan standar kehidupan yang terlihat di media sosial, dan dengan harapan yang dibentuk oleh pendidikan serta urbanisasi. Ketika aspirasi tumbuh lebih cepat daripada peluang, rasa ketertinggalan dapat meningkat walaupun pendapatan absolut naik. Fenomena ini menjelaskan mengapa keberhasilan makro kadang tidak segera meningkatkan kepuasan publik.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'konektivitas sebagai pemerataan kesempatan' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

10. Layanan Publik sebagai Pendapatan Sosial

Konsep social wage

Kesejahteraan tidak hanya berasal dari uang yang masuk ke rekening. Layanan publik berkualitas berfungsi sebagai pendapatan sosial atau social wage. Jika sekolah negeri bermutu, layanan kesehatan mudah diakses, transportasi publik murah, ruang kota aman, dan air bersih tersedia, rumah tangga tidak perlu membeli semuanya secara privat. Akibatnya, pendapatan yang sama menghasilkan kualitas hidup lebih tinggi. Sebaliknya, layanan publik yang lemah memaksa rumah tangga mengeluarkan biaya tambahan dan memperbesar ketimpangan.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'konsep social wage' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Kualitas, bukan sekadar anggaran

Belanja publik yang besar tidak otomatis menghasilkan layanan bermutu. Kualitas membutuhkan desain program, kompetensi pelaksana, pengukuran hasil, akuntabilitas, dan mekanisme umpan balik. Dalam pendidikan, indikator tidak cukup berupa jumlah sekolah atau guru; perlu melihat literasi, numerasi, keterampilan berpikir kritis, dan kesiapan kerja. Dalam kesehatan, bukan hanya jumlah fasilitas, tetapi waktu tunggu, kualitas diagnosis, kontinuitas pelayanan, dan perlindungan finansial. Tata kelola menentukan seberapa efektif setiap rupiah anggaran berubah menjadi kesejahteraan.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'kualitas, bukan sekadar anggaran' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Kepercayaan publik

Ketika warga membayar pajak tetapi tidak melihat perbaikan layanan, kepercayaan fiskal menurun. Sebaliknya, layanan yang nyata dapat meningkatkan willingness to pay dan kepatuhan. Hubungan antara pajak dan layanan adalah kontrak sosial. Negara yang mampu menunjukkan manfaat publik secara transparan memiliki legitimasi lebih kuat untuk membiayai program redistributif. Karena itu, kesejahteraan bukan hanya soal besaran belanja, tetapi juga kualitas interaksi warga dengan institusi.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'kepercayaan publik' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

11. Harga Pangan, Energi, dan Biaya Hidup

Inflasi heterogen

Tekanan biaya hidup berbeda menurut kelompok pendapatan. Rumah tangga miskin lebih sensitif terhadap harga beras, telur, minyak goreng, gas, transportasi, dan sewa sederhana. Rumah tangga menengah juga merasakan pendidikan, perumahan, kendaraan, dan kesehatan. Kebijakan inflasi yang efektif perlu memadukan stabilitas makro dengan pembenahan sisi penawaran: produktivitas pertanian, rantai dingin, gudang, distribusi antardaerah, pasar yang kompetitif, dan data stok yang kredibel.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'inflasi heterogen' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Kebijakan pangan dan kesejahteraan petani

Harga pangan mengandung dilema. Konsumen menginginkan harga rendah, sedangkan petani membutuhkan harga yang memberi margin layak. Menekan harga melalui impor murah secara terus-menerus dapat merugikan produsen domestik, tetapi menahan pasokan demi harga tinggi membebani konsumen. Solusi jangka panjang adalah menaikkan produktivitas, menurunkan biaya logistik, memperbaiki pascapanen, memperkuat koperasi, dan meningkatkan transparansi rantai nilai sehingga harga konsumen terjangkau tanpa menekan pendapatan petani.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'kebijakan pangan dan kesejahteraan petani' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Energi dan risiko eksternal

Indonesia tetap terpapar fluktuasi harga energi global. Ketika harga minyak naik, dampaknya masuk melalui impor, transportasi, subsidi, biaya produksi, dan inflasi. Pemerintah menghadapi trade-off antara menjaga daya beli dan menjaga kesehatan fiskal. Transisi energi dapat mengurangi kerentanan jangka panjang, tetapi harus dirancang adil agar biaya penyesuaian tidak dibebankan pada rumah tangga rentan dan industri padat tenaga kerja. Efisiensi energi, elektrifikasi transportasi, energi terbarukan, dan transportasi massal dapat menjadi strategi kesejahteraan sekaligus strategi ketahanan.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'energi dan risiko eksternal' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang

mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

12. UMKM, Produktivitas, dan Mobilitas Ekonomi

UMKM sebagai basis kerja

UMKM menyerap tenaga kerja besar dan menjadi pintu masuk kewirausahaan. Namun banyak UMKM bertahan pada produktivitas rendah karena skala kecil, teknologi terbatas, manajemen sederhana, pembiayaan mahal, dan akses pasar sempit. Jika kebijakan hanya mendorong jumlah UMKM tanpa membantu mereka naik kelas, perekonomian dapat terjebak pada fragmentasi produktivitas rendah. Agenda kesejahteraan harus membantu usaha kecil tumbuh, bukan sekadar bertahan.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'umkm sebagai basis kerja' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Naik kelas melalui ekosistem

Naik kelas memerlukan ekosistem: legalitas yang sederhana, pembukuan digital, pembayaran elektronik, akses kredit berbasis data, pengadaan pemerintah, standar mutu, desain produk, pemasaran, kemitraan dengan perusahaan besar, dan ekspor. Program pelatihan harus berbasis masalah nyata usaha, bukan seminar generik. Digitalisasi efektif ketika mengurangi biaya transaksi dan memperluas pasar, bukan ketika hanya menambah aplikasi. Target akhirnya adalah peningkatan produktivitas per pekerja dan pendapatan pemilik serta pekerja.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'naik kelas melalui ekosistem' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini

menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Koperasi dan collective efficiency

Untuk usaha sangat kecil dan petani, skala dapat dibangun melalui kelembagaan kolektif. Koperasi modern dapat menggabungkan pembelian input, pengolahan, penyimpanan, logistik, pembiayaan, dan pemasaran. Nilai utama koperasi bukan romantisme organisasi, melainkan *collective efficiency*: biaya turun, posisi tawar naik, dan akses teknologi membaik. Agar efektif, koperasi membutuhkan tata kelola profesional, transparansi, audit, dan insentif yang sehat.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah *technocratic complacency*, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan *household welfare* sebagai *ultimate outcome*. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai *input-process-output-outcome-impact*. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'koperasi dan *collective efficiency*' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

13. Transformasi Digital, AI, dan Distribusi Manfaat

Teknologi sebagai pengungkit sekaligus pembagi

Digitalisasi dan kecerdasan artifisial dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya informasi, mempercepat layanan, dan membuka model bisnis baru. Namun teknologi juga dapat memperlebar kesenjangan bila manfaat terkonsentrasi pada perusahaan besar dan pekerja berkeahlian tinggi. Perbedaan akses perangkat, konektivitas, data, literasi, dan kemampuan organisasi menghasilkan *digital divide* yang baru: bukan sekadar siapa yang terhubung, tetapi siapa yang mampu mengubah konektivitas menjadi pendapatan.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi *turnover* tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan *reputational risk*. Sebaliknya, perusahaan yang membangun *shared value* dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'teknologi sebagai pengungkit sekaligus pembagi' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

AI dan pekerjaan

AI tidak hanya menggantikan tugas rutin; ia juga mengubah komposisi keterampilan dalam pekerjaan profesional. Pekerja yang mampu menggunakan AI sebagai alat augmentasi dapat meningkatkan produktivitas, sedangkan pekerja yang tugasnya mudah diotomasi berisiko kehilangan bargaining power. Kebijakan perlu menggeser pendidikan dan pelatihan dari penguasaan konten menuju kemampuan problem solving, literasi data, kreativitas, komunikasi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Reskilling harus dipandang sebagai infrastruktur ekonomi, bukan program tambahan.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'ai dan pekerjaan' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Distribusi data dan platform

Ekonomi platform menciptakan efisiensi tetapi menimbulkan pertanyaan baru tentang kepemilikan data, algoritma, biaya komisi, transparansi, dan perlindungan pekerja. Regulasi yang terlalu berat dapat mematikan inovasi, tetapi regulasi yang terlalu longgar dapat memindahkan risiko kepada pekerja dan konsumen. Pendekatan yang tepat menuntut portabilitas reputasi, transparansi aturan, perlindungan data, mekanisme banding, dan kontribusi jaminan sosial yang proporsional.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dari sisi perilaku, persepsi kesejahteraan juga dibentuk oleh perbandingan sosial dan ekspektasi. Masyarakat tidak hanya membandingkan pendapatan hari ini dengan kemarin, tetapi juga dengan kelompok lain, dengan standar kehidupan yang terlihat di media sosial, dan dengan harapan yang dibentuk oleh pendidikan serta urbanisasi. Ketika aspirasi tumbuh lebih cepat daripada peluang, rasa ketertinggalan dapat meningkat walaupun pendapatan absolut naik. Fenomena ini menjelaskan mengapa keberhasilan makro kadang tidak segera meningkatkan kepuasan publik.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'distribusi data dan platform' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

14. Fiskal, Pajak, dan Redistribusi Produktif

Pajak sebagai instrumen pembangunan

Sistem pajak membiayai layanan publik dan memengaruhi distribusi. Tantangannya adalah memperluas basis pajak tanpa menghukum aktivitas produktif. Kepatuhan meningkat ketika sistem sederhana, administrasi adil, dan layanan publik terasa. Redistribusi produktif bukan hanya memindahkan pendapatan dari kaya ke miskin, tetapi menggunakan penerimaan untuk memperkuat kapasitas produktif masyarakat: gizi, pendidikan, kesehatan, transportasi, sanitasi, dan konektivitas.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'pajak sebagai instrumen pembangunan' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Kualitas belanja

Efektivitas fiskal bergantung pada kualitas belanja. Subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menghabiskan ruang fiskal tanpa menghasilkan perubahan struktural. Sebaliknya, belanja yang meningkatkan modal manusia dan produktivitas memberi manfaat jangka panjang. Evaluasi program harus melihat *additionality*: apakah program benar-benar mengubah perilaku atau hasil yang tidak akan terjadi tanpa

intervensi. Penganggaran berbasis hasil memerlukan data yang dapat dipercaya dan keberanian menghentikan program yang tidak efektif.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'kualitas belanja' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Utang dan keadilan antargenerasi

Utang publik dapat membiayai investasi yang produktif, tetapi juga dapat memindahkan beban ke generasi mendatang. Prinsip keadilan antargenerasi menuntut agar pembiayaan utang dipakai terutama untuk aset atau program yang memberi manfaat jangka panjang. Transparansi proyek, analisis manfaat-biaya, dan pengelolaan risiko sangat penting. Pertumbuhan yang dibeli dengan beban fiskal besar tanpa peningkatan produktivitas dapat menciptakan ilusi kesejahteraan sementara.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dari sisi perilaku, persepsi kesejahteraan juga dibentuk oleh perbandingan sosial dan ekspektasi. Masyarakat tidak hanya membandingkan pendapatan hari ini dengan kemarin, tetapi juga dengan kelompok lain, dengan standar kehidupan yang terlihat di media sosial, dan dengan harapan yang dibentuk oleh pendidikan serta urbanisasi. Ketika aspirasi tumbuh lebih cepat daripada peluang, rasa ketertinggalan dapat meningkat walaupun pendapatan absolut naik. Fenomena ini menjelaskan mengapa keberhasilan makro kadang tidak segera meningkatkan kepuasan publik.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'utang dan keadilan antargenerasi' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

15. Tata Kelola, Korupsi, dan Ekonomi Politik Kesejahteraan

Institusi menentukan distribusi

Pertumbuhan tidak terjadi di ruang hampa. Institusi menentukan siapa memperoleh lisensi, akses lahan, kredit, kontrak, dan perlindungan hukum. Jika aturan dapat dibeli, pertumbuhan cenderung memusat pada kelompok yang memiliki akses politik. Korupsi tidak hanya mengurangi anggaran, tetapi

mengubah struktur insentif: perusahaan lebih tertarik membangun koneksi daripada inovasi. Akibatnya produktivitas turun dan ketimpangan kesempatan meningkat.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'institusi menentukan distribusi' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Competition policy

Persaingan usaha merupakan kebijakan kesejahteraan karena mencegah rente monopoli dan menjaga harga. Pasar yang terkonsentrasi dapat menekan pemasok kecil, pekerja, dan konsumen. Kebijakan persaingan perlu diperkuat pada sektor-sektor yang memiliki network effects, barriers to entry, atau konsentrasi aset. Dalam ekonomi digital, isu ini terkait dengan data dan platform. Tujuannya bukan menghukum perusahaan besar, melainkan memastikan keunggulan diperoleh melalui efisiensi dan inovasi, bukan penguncian pasar.

Dari sisi perilaku, persepsi kesejahteraan juga dibentuk oleh perbandingan sosial dan ekspektasi. Masyarakat tidak hanya membandingkan pendapatan hari ini dengan kemarin, tetapi juga dengan kelompok lain, dengan standar kehidupan yang terlihat di media sosial, dan dengan harapan yang dibentuk oleh pendidikan serta urbanisasi. Ketika aspirasi tumbuh lebih cepat daripada peluang, rasa ketertinggalan dapat meningkat walaupun pendapatan absolut naik. Fenomena ini menjelaskan mengapa keberhasilan makro kadang tidak segera meningkatkan kepuasan publik.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'competition policy' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan

analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Partisipasi dan akuntabilitas

Kebijakan yang menyangkut kesejahteraan lebih efektif ketika warga dapat memberi umpan balik dan mengetahui alasan keputusan. Transparansi anggaran, data kinerja, kanal pengaduan, konsultasi publik, serta evaluasi independen membangun akuntabilitas. Partisipasi tidak berarti setiap keputusan harus mengikuti opini mayoritas, tetapi proses harus dapat dijelaskan dan diuji. Kepercayaan tumbuh ketika pemerintah berani mengakui trade-off dan menunjukkan bukti.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'partisipasi dan akuntabilitas' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

16. Mengukur Kesejahteraan Secara Lebih Lengkap

Dashboard multidimensi

Jika kebijakan hanya memiliki satu target utama, organisasi cenderung mengoptimalkan target itu dan mengabaikan aspek lain. Karena itu Indonesia memerlukan dashboard kesejahteraan yang memadukan PDB, median pendapatan, upah riil, kemiskinan, ketimpangan, formalitas kerja, produktivitas, kualitas pembelajaran, kesehatan, keterjangkauan perumahan, keamanan, kualitas lingkungan, dan kepuasan hidup. Indikator harus ditampilkan menurut wilayah, gender, umur, dan kelompok pendapatan agar ketimpangan tersembunyi tidak hilang di balik rata-rata nasional.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'dashboard multidimensi' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Dari output ke outcome

Pemerintah sering mudah mengukur input dan output: berapa anggaran dibelanjakan, berapa kilometer jalan dibangun, berapa pelatihan dilaksanakan. Namun kesejahteraan bergantung pada outcome: apakah waktu tempuh turun, pendapatan naik, kecelakaan berkurang, atau kompetensi meningkat. Perubahan orientasi ke outcome membutuhkan data longitudinal dan evaluasi dampak. Ini juga menuntut perubahan budaya birokrasi dari kepatuhan prosedural menuju pembelajaran kebijakan.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'dari output ke outcome' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Median dan distribusi

Untuk memahami pengalaman warga, median sering lebih informatif daripada rata-rata. Median menunjukkan kondisi orang di tengah distribusi dan tidak terlalu terpengaruh oleh nilai ekstrem. Selain median, indikator persentil bawah dan atas dapat menunjukkan apakah kemajuan tersebar. Jika pertumbuhan pendapatan kelompok 40 persen terbawah lebih cepat daripada rata-rata nasional, pertumbuhan dapat disebut lebih inklusif. Jika kelompok atas jauh lebih cepat, ketimpangan akan meningkat meskipun kemiskinan turun.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi

publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'median dan distribusi' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

17. Agenda Kebijakan: Menjadikan Pertumbuhan Terasa

Pilar pertama: pekerjaan produktif

Prioritas pertama adalah memperbanyak good jobs. Ini memerlukan strategi industri yang realistis: memperkuat manufaktur bernilai tambah, agroindustri, hilirisasi yang terkoneksi dengan pemasok domestik, jasa modern, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau. Insentif investasi harus dikaitkan dengan transfer keterampilan, pengembangan pemasok lokal, produktivitas, dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Kebijakan tenaga kerja harus memberi fleksibilitas bagi perusahaan sekaligus keamanan bagi pekerja melalui jaminan sosial yang portabel.

Dari sisi perilaku, persepsi kesejahteraan juga dibentuk oleh perbandingan sosial dan ekspektasi. Masyarakat tidak hanya membandingkan pendapatan hari ini dengan kemarin, tetapi juga dengan kelompok lain, dengan standar kehidupan yang terlihat di media sosial, dan dengan harapan yang dibentuk oleh pendidikan serta urbanisasi. Ketika aspirasi tumbuh lebih cepat daripada peluang, rasa ketertinggalan dapat meningkat walaupun pendapatan absolut naik. Fenomena ini menjelaskan mengapa keberhasilan makro kadang tidak segera meningkatkan kepuasan publik.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'pilar pertama: pekerjaan produktif' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasangkan data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Pilar kedua: biaya hidup dan layanan dasar

Kebijakan kesejahteraan harus menekan biaya hidup struktural. Perumahan terjangkau, transportasi massal, layanan kesehatan primer, sekolah publik bermutu, dan pangan yang efisien dapat menaikkan disposable income tanpa harus menaikkan gaji nominal secara ekstrem. Ini adalah bentuk redistribusi melalui layanan. Investasi transportasi publik, misalnya, menurunkan biaya perjalanan, memperluas radius pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas kota sekaligus mengurangi polusi.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan

dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'pilar kedua: biaya hidup dan layanan dasar' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Pilar ketiga: mobilitas sosial

Mobilitas sosial memerlukan intervensi dari usia dini hingga pasar kerja. Gizi ibu-anak, PAUD, sekolah dasar bermutu, pendidikan menengah yang relevan, vokasi modern, perguruan tinggi, magang, dan micro-credentials harus terhubung sebagai satu sistem. Beasiswa sebaiknya tidak hanya membiayai biaya pendidikan, tetapi juga mengatasi hambatan transportasi, perangkat, dan mentoring. Tujuannya adalah membuat latar belakang keluarga semakin kecil pengaruhnya terhadap kesempatan hidup.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'pilar ketiga: mobilitas sosial' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Pilar keempat: perlindungan sosial adaptif

Perlindungan sosial perlu responsif terhadap guncangan. Integrasi basis data sosial ekonomi, interoperabilitas layanan, pembayaran digital, dan mekanisme verifikasi harus memungkinkan bantuan meningkat ketika terjadi krisis. Program juga perlu terhubung dengan layanan ketenagakerjaan,

pelatihan, dan dukungan usaha agar penerima memiliki jalur menuju kemandirian. Prinsipnya adalah melindungi manusia tanpa mematikan insentif produktif.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam perspektif strategic management, tantangan utama adalah alignment. Sasaran pertumbuhan, stabilitas, penciptaan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan sering ditempatkan dalam silo yang berbeda. Padahal keputusan pada satu bidang menghasilkan konsekuensi pada bidang lain. Misalnya, kebijakan energi memengaruhi inflasi, fiskal, industri, dan daya beli; kebijakan pendidikan memengaruhi produktivitas dan ketimpangan bertahun-tahun kemudian. Pemerintahan yang efektif perlu mengelola trade-off secara lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan dengan indikator bersama yang terukur.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'pilar keempat: perlindungan sosial adaptif' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Pilar kelima: tata kelola dan kepercayaan

Tanpa tata kelola, agenda kesejahteraan kehilangan efektivitas. Pengadaan transparan, pencegahan konflik kepentingan, open data, audit berbasis risiko, dan evaluasi independen harus diperkuat. Pemerintah juga perlu berkomunikasi dengan lebih jujur tentang trade-off, misalnya antara subsidi dan belanja pembangunan, antara proteksi industri dan harga konsumen, atau antara upah minimum dan produktivitas. Kepercayaan publik tumbuh dari konsistensi dan bukti, bukan slogan.

Kebijakan yang baik harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah technocratic complacency, yaitu merasa cukup karena indikator agregat membaik. Ekstrem kedua adalah populisme jangka pendek yang membagikan manfaat tanpa memperkuat produktivitas dan kapasitas fiskal. Jalan tengahnya adalah kebijakan berbasis bukti yang menjaga stabilitas makro sekaligus menempatkan household welfare sebagai ultimate outcome. Dengan demikian, pertumbuhan berfungsi sebagai sumber daya untuk memperluas pilihan hidup masyarakat.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'pilar kelima: tata kelola dan kepercayaan' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindari analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi

merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

18. Kesimpulan: Dari Pertumbuhan Menuju Kehidupan yang Lebih Baik

Jawaban atas pertanyaan rakyat

Ketika rakyat bertanya 'di mana kesejahteraan?', jawaban terbaik bukan menunjukkan grafik pertumbuhan sebagai bantahan. Jawaban yang lebih bermakna adalah menunjukkan bagaimana pertumbuhan diterjemahkan menjadi pekerjaan layak, upah riil, layanan publik, perlindungan dari guncangan, rumah yang terjangkau, pendidikan bermutu, dan kesempatan bagi anak untuk hidup lebih baik daripada orang tuanya. Statistik makro perlu diimbangi dengan pengalaman mikro.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'jawaban atas pertanyaan rakyat' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Pertumbuhan tetap perlu

Kesejahteraan tidak dapat dibangun hanya melalui distribusi tanpa pertumbuhan produktivitas. Negara memerlukan basis ekonomi yang membesar agar dapat membiayai layanan dan menciptakan pekerjaan. Namun pertumbuhan bukan tujuan akhir. Ia adalah mesin yang harus dirancang agar tenaga, bahan bakar, dan arah perjalanannya membawa masyarakat menuju peningkatan kapabilitas. Fokus kebijakan bukan memilih antara pertumbuhan atau pemerataan, melainkan membangun institusi yang membuat keduanya saling memperkuat.

Implikasi bagi dunia usaha juga besar. Perusahaan tidak beroperasi terpisah dari kesejahteraan sosial. Upah, keamanan kerja, pengembangan keterampilan, rantai pasok lokal, kualitas produk, pajak, dan dampak lingkungan menentukan legitimasi sosial perusahaan. Organisasi yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat menghadapi turnover tinggi, konflik sosial, regulasi lebih keras, dan reputational risk. Sebaliknya, perusahaan yang membangun shared value dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat masyarakat tempat mereka beroperasi.

Dari sudut pandang manajemen publik, isu ini dapat dianalisis melalui rantai input-process-output-outcome-impact. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu output sistem produksi nasional, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome dan impact yang dipengaruhi oleh banyak mediator: struktur pasar

kerja, harga, kualitas layanan, redistribusi, dan aset rumah tangga. Ketika hubungan antar-tahap lemah, output yang baik tidak otomatis menjadi outcome yang baik. Karena itu, pemerintah dan organisasi publik perlu memiliki indikator penghubung yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kebijakan memengaruhi rumah tangga, bukan hanya bagaimana kebijakan memengaruhi PDB.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'pertumbuhan tetap perlu' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

Ukuran keberhasilan baru

Keberhasilan pembangunan harus dilihat dari apakah masyarakat lebih aman menghadapi masa depan, memiliki pekerjaan yang bermartabat, mampu memenuhi kebutuhan tanpa utang yang menjerat, memperoleh layanan publik yang dapat dipercaya, dan memiliki kesempatan untuk maju melalui usaha serta pendidikan. Dengan ukuran seperti itu, pertumbuhan ekonomi memperoleh makna sosialnya. Kesejahteraan bukan sekadar angka yang diumumkan setiap triwulan; ia adalah kualitas hidup yang dirasakan setiap hari.

Dalam konteks pendidikan manajemen, topik ini penting karena mahasiswa perlu memahami bahwa keputusan ekonomi selalu memiliki distribusi manfaat dan biaya. Analisis investasi, efisiensi, dan produktivitas perlu dilengkapi dengan pertanyaan etis dan sosial: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung risiko, dan apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil. Kompetensi manajerial masa depan bukan hanya kemampuan mengoptimalkan angka, tetapi kemampuan memahami sistem kompleks, stakeholder, dan konsekuensi jangka panjang.

Dalam kerangka artikel ini, pokok 'ukuran keberhasilan baru' perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan operasional: indikator apa yang berubah, kelompok mana yang paling terdampak, melalui saluran apa perubahan itu terjadi, dan seberapa berkelanjutan hasilnya. Pendekatan seperti ini menghindarkan analisis dari simplifikasi. Kebijakan ekonomi bukan sekadar memilih instrumen, tetapi merancang mekanisme transmisi dari kebijakan menuju kesejahteraan. Karena itu, evaluasi harus memasang data makro dengan data rumah tangga, pasar kerja, harga, dan kualitas layanan publik.

19. Kerangka Analitis Terintegrasi: Growth-to-Welfare Transmission

Untuk memahami bagaimana pertumbuhan berubah menjadi kesejahteraan, dapat digunakan kerangka transmission chain yang terdiri atas enam tahap. Tahap pertama adalah penciptaan nilai tambah melalui produksi dan investasi. Tahap kedua adalah distribusi pendapatan primer melalui upah, laba, sewa, dan pendapatan usaha. Tahap ketiga adalah redistribusi melalui pajak, transfer, dan subsidi. Tahap keempat adalah perubahan harga yang menentukan daya beli. Tahap kelima adalah akses terhadap layanan publik dan aset. Tahap keenam adalah outcome manusia berupa kesehatan, pendidikan, keamanan, partisipasi, dan kepuasan hidup. Kegagalan pada satu mata rantai dapat menjelaskan mengapa pertumbuhan yang kuat tidak terasa luas.

Contohnya, hilirisasi mineral dapat meningkatkan ekspor, investasi, dan PDB. Namun dampak kesejahteraannya bergantung pada berapa banyak pekerjaan lokal yang tercipta, kualitas upah, keterkaitan dengan pemasok domestik, penerimaan fiskal, biaya lingkungan, serta penggunaan penerimaan untuk layanan publik. Jika sebagian besar input dan tenaga ahli berasal dari luar, laba terkonsentrasi, dan eksternalitas lingkungan tinggi, multiplier lokal menjadi terbatas. Sebaliknya, jika

hilirisasi terhubung dengan politeknik, pemasok UMKM, riset, dan infrastruktur daerah, nilai tambah dapat menyebar lebih luas.

Kerangka yang sama berlaku pada digitalisasi. Sebuah platform dapat menaikkan efisiensi transaksi dan PDB sektor jasa, tetapi kesejahteraan pekerja platform dipengaruhi oleh tarif, algoritma, jam kerja, kecelakaan, dan biaya kendaraan. Karena itu regulasi tidak boleh menilai inovasi hanya dari nilai transaksi atau valuasi perusahaan. Indikator harus mencakup distribusi manfaat antara platform, mitra, konsumen, dan pemerintah.

Dari perspektif Balanced Scorecard untuk pembangunan, dimensi finansial dapat diwakili oleh pertumbuhan, inflasi, dan fiskal; dimensi masyarakat oleh kemiskinan, ketimpangan, kepuasan dan akses layanan; dimensi proses internal oleh kualitas birokrasi dan efektivitas program; sedangkan dimensi pembelajaran dan pertumbuhan oleh kualitas SDM, riset, digitalisasi, dan kemampuan adaptasi institusi. Pendekatan ini membantu menghindari dominasi satu indikator dan mendorong keseimbangan antara hasil jangka pendek dan kapasitas jangka panjang.

Pada akhirnya, growth-to-welfare transmission adalah persoalan desain institusi. Negara dan pasar harus bekerja sebagai sistem yang menciptakan produktivitas sekaligus menyebarkan kesempatan. Pasar memberi sinyal harga dan insentif inovasi, sementara negara menyediakan aturan, barang publik, perlindungan terhadap kegagalan pasar, dan jaring pengaman. Kesejahteraan tinggi memerlukan keduanya berfungsi secara komplementer.

20. Implikasi untuk Pengajaran Manajemen dan Kepemimpinan

Bagi pendidikan manajemen, isu pertumbuhan dan kesejahteraan dapat dipakai untuk melatih systems thinking. Mahasiswa perlu melihat bahwa keputusan harga, upah, investasi, teknologi, supply chain, dan lokasi pabrik memiliki konsekuensi sosial. Kasus perusahaan yang meningkatkan otomatisasi, misalnya, harus dianalisis dari produktivitas, biaya, kualitas, reskilling, hubungan industrial, dan reputasi. Dengan demikian manajemen tidak berhenti pada optimasi internal, tetapi memahami dampak eksternal.

Kepemimpinan di era AI juga menuntut kemampuan mengelola transisi. Seorang pemimpin yang hanya mengejar efisiensi dapat memangkas tenaga kerja terlalu cepat dan merusak trust. Sebaliknya, pemimpin yang menolak teknologi demi mempertahankan semua proses lama dapat membuat organisasi tidak kompetitif. Pendekatan yang bertanggung jawab adalah memperkenalkan teknologi sambil memetakan pekerjaan yang berubah, menyiapkan pelatihan, merancang redeployment, dan menetapkan standar etis penggunaan data serta algoritma.

Dalam kelas, dosen dapat menggunakan pertanyaan 'siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang menanggung risiko?' untuk setiap kasus strategi. Pertanyaan tersebut melatih stakeholder analysis dan mencegah mahasiswa menganggap efisiensi sebagai konsep netral. Keputusan yang efisien pada tingkat perusahaan dapat menimbulkan biaya sosial jika eksternalitas tidak dihitung. Sebaliknya, kebijakan sosial yang tampak mahal dapat menghasilkan return jangka panjang melalui produktivitas manusia.

Mahasiswa juga perlu dibiasakan membedakan korelasi dari kausalitas. Kenaikan PDB dan penurunan kemiskinan dapat terjadi bersamaan, tetapi kontribusi masing-masing kebijakan perlu diuji. Evaluasi dampak, eksperimen kebijakan, natural experiments, difference-in-differences, regression discontinuity, dan analisis longitudinal memberi perangkat untuk memahami mekanisme. Dalam era big data dan AI, kemampuan menggabungkan analitik dengan penilaian etis menjadi kompetensi manajemen yang semakin penting.

Dengan demikian topik kesejahteraan bukan hanya wilayah ekonomi publik. Ia merupakan bagian dari strategi, kepemimpinan, HR, pemasaran, operasi, keuangan, inovasi, dan tata kelola. Organisasi yang

memahami hubungan antara nilai ekonomi dan nilai sosial akan lebih siap menghadapi perubahan ekspektasi masyarakat, regulasi, dan risiko reputasi.

21. Matriks Prioritas Kebijakan

Prioritas	Instrumen Utama	Indikator Hasil	Risiko yang Harus Dijaga
Good jobs	Strategi industri, vokasi, magang, insentif investasi berbasis kualitas kerja	Upah riil, formalitas, produktivitas, mobilitas kerja	Subsidisasi perusahaan tanpa additionality
Biaya hidup	Pangan, transportasi publik, perumahan, kesehatan primer	Disposable income, beban perumahan, inflasi kelompok rendah	Distorsi harga dan beban fiskal
Mobilitas sosial	PAUD, sekolah bermutu, beasiswa, digital access	Learning outcomes, transisi sekolah-kerja	Program terfragmentasi dan mismatch keterampilan
Perlindungan sosial	Data terpadu, jaminan sosial portabel, bantuan adaptif	Poverty exits, shock resilience, coverage	Leakage dan exclusion error
UMKM produktif	Digital bookkeeping, pembiayaan, procurement, klaster	Produktivitas per pekerja, omzet, formalitas	Kredit tanpa peningkatan kapasitas
AI inklusif	Reskilling, governance, akses komputasi dan data	Adopsi produktif, wage premium, job transitions	Digital divide dan displacement
Tata kelola	Open data, audit, competition policy, evaluasi dampak	Efektivitas belanja, trust, penurunan rente	Capture dan compliance formalistik

Penutup

Pembangunan ekonomi yang matang harus mampu menjawab dua jenis pertanyaan sekaligus. Pertanyaan pertama bersifat makro: apakah ekonomi tumbuh, inflasi terkendali, fiskal sehat, investasi meningkat, dan produktivitas membaik? Pertanyaan kedua bersifat manusiawi: apakah warga memiliki pekerjaan yang layak, dapat membeli kebutuhan dasar, memiliki waktu untuk keluarga, memperoleh layanan publik yang baik, dan melihat masa depan dengan keyakinan? Kedua jenis pertanyaan tidak saling meniadakan; justru harus dipertemukan dalam satu kerangka kebijakan.

Indonesia telah mencatat kemajuan penting dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan dan memperkuat jalur transmisi menuju kesejahteraan. Ini memerlukan kebijakan yang lebih presisi, data yang lebih baik, koordinasi yang lebih kuat, serta kesediaan mengevaluasi program berdasarkan outcome. Pada level perusahaan, diperlukan strategi yang menghubungkan produktivitas dengan pengembangan manusia. Pada level masyarakat, diperlukan ruang partisipasi dan institusi yang dapat dipercaya.

Pertanyaan 'di mana kesejahteraan?' seharusnya tidak dipandang sebagai sikap pesimis. Ia adalah mekanisme akuntabilitas yang sehat. Pertanyaan itu mengingatkan bahwa tujuan akhir perekonomian bukan sekadar memperbesar angka transaksi, produksi, atau valuasi, melainkan memperluas kemampuan manusia untuk hidup aman, sehat, produktif, bermartabat, dan memiliki harapan. Ketika pertumbuhan berhasil mencapai tujuan tersebut, statistik dan pengalaman rakyat akan mulai berbicara dalam bahasa yang sama.

22. Enam Ilustrasi Kasus: Bagaimana Pertumbuhan Diterjemahkan ke Kesejahteraan

Kasus 1 - Hilirisasi mineral dan ekonomi daerah

Bayangkan sebuah kabupaten yang menerima investasi smelter besar. Dalam dua tahun, nilai investasi melonjak, ekspor meningkat, dan PDRB daerah tumbuh dua digit. Pemerintah pusat dapat mencatat proyek tersebut sebagai keberhasilan industrialisasi. Namun bagi masyarakat lokal, pertanyaan kesejahteraan baru dimulai. Jika pekerja terampil didatangkan dari luar, pemasok utama berasal dari perusahaan besar di kota lain, dan hunian pekerja berada dalam kawasan tertutup, multiplier effect lokal dapat terbatas. Harga sewa tanah dan rumah bahkan dapat meningkat sehingga sebagian warga menanggung biaya hidup lebih tinggi tanpa menikmati kenaikan pendapatan setara. Dalam situasi ini, angka pertumbuhan regional benar, tetapi distribusi manfaatnya sempit.

Agar hilirisasi benar-benar menjadi strategi kesejahteraan, pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga pendidikan perlu merancang local linkage. Politeknik dapat membuka program metalurgi, maintenance, keselamatan kerja, otomasi, dan logistik. UMKM lokal dibantu memenuhi standar procurement perusahaan. Pemerintah menyiapkan perumahan, air, transportasi, dan layanan kesehatan agar tekanan urbanisasi tidak memperburuk kualitas hidup. Perusahaan mengembangkan career ladder sehingga tenaga lokal tidak hanya masuk sebagai pekerja berkeahlian rendah. Dengan desain seperti itu, investasi yang sama menghasilkan outcome sosial berbeda: produktivitas meningkat sekaligus kapasitas manusia dan bisnis lokal berkembang.

Kasus ini menunjukkan pentingnya membedakan direct effect, indirect effect, dan induced effect. Direct effect berasal dari pekerjaan serta aktivitas perusahaan utama. Indirect effect berasal dari pemasok, kontraktor, dan jasa pendukung. Induced effect berasal dari belanja pendapatan pekerja yang kemudian menggerakkan perdagangan, perumahan, dan layanan lokal. Kebijakan yang baik memperbesar ketiga efek tersebut sambil mengendalikan eksternalitas seperti polusi, kemacetan, konflik lahan, dan inflasi lokal.

Kasus 2 - Kota tumbuh, tetapi pekerja tercekik biaya perumahan

Sebuah kota metropolitan dapat mencatat pertumbuhan tinggi karena jasa keuangan, properti, teknologi, ritel, dan transportasi berkembang. Kesempatan kerja banyak, tetapi harga rumah dan sewa dapat meningkat lebih cepat daripada upah. Seorang pekerja muda mungkin menerima kenaikan gaji setiap tahun, namun waktu tempuhnya dua jam, biaya transportasi besar, dan kemampuan membeli rumah terus menjauh. Secara statistik ia termasuk kelompok bekerja dan mungkin berada di atas garis kelas menengah, tetapi rasa aman ekonominya rendah. Ia menunda menikah, kepemilikan rumah, atau memiliki anak karena biaya tetap terlalu besar.

Kebijakan perumahan dalam konteks ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan kebijakan produktivitas. Hunian terjangkau dekat pusat kerja mengurangi waktu perjalanan, meningkatkan kesehatan, dan memperluas matching antara pekerja dan perusahaan. Transit-oriented development, rental housing yang layak, kepastian tata ruang, dan pajak atas lahan menganggur dapat membantu memperbaiki supply. Transportasi massal yang terintegrasi memperluas wilayah tempat tinggal efektif tanpa memaksa rumah tangga membeli kendaraan pribadi. Dengan demikian, pendapatan riil meningkat melalui penurunan biaya, bukan hanya melalui kenaikan gaji.

Kasus ini juga mengingatkan bahwa perumahan memiliki dua fungsi sekaligus: sebagai kebutuhan dasar dan aset investasi. Ketika kebijakan terlalu mendorong rumah sebagai instrumen spekulasi, generasi yang belum memiliki aset menghadapi barrier to entry yang semakin tinggi. Pertumbuhan harga aset kemudian memperbesar ketimpangan kekayaan antargenerasi. Karena itu, desain kebijakan perumahan

harus menyeimbangkan stabilitas pasar, perlindungan konsumen, dan akses kepemilikan atau sewa jangka panjang yang terjangkau.

Kasus 3 - UMKM digital: omzet naik, laba belum tentu naik

Seorang pelaku UMKM makanan mulai berjualan melalui marketplace dan aplikasi pesan antar. Omzet meningkat karena jangkauan pasar lebih luas. Namun ia juga menghadapi biaya komisi, iklan digital, potongan promosi, kemasan, dan logistik. Jika hanya melihat gross merchandise value, digitalisasi tampak sepenuhnya positif. Akan tetapi kesejahteraan pemilik usaha ditentukan oleh margin bersih, stabilitas arus kas, dan kemampuan mengakumulasi modal. Banyak usaha dapat mengalami paradox of growth: penjualan naik tetapi laba tidak bertambah karena biaya variabel ikut meningkat.

Intervensi yang lebih cerdas bukan sekadar mendorong UMKM masuk platform, melainkan meningkatkan managerial capability. Pembukuan digital membantu memisahkan omzet dan laba. Analisis produk menunjukkan menu mana yang memberikan margin tertinggi. Data pelanggan digunakan untuk meningkatkan repeat order. Pembelian bahan baku dapat digabung melalui koperasi atau cluster agar biaya turun. Akses kredit seharusnya mengikuti rekam transaksi dan kemampuan membayar, bukan sekadar target penyaluran. Dengan demikian, digitalisasi berubah dari kanal penjualan menjadi alat peningkatan produktivitas.

Dari perspektif kesejahteraan, keberhasilan UMKM sebaiknya diukur melalui peningkatan pendapatan pemilik, upah pekerja, formalitas, survival rate, dan kemampuan usaha berinvestasi. Jumlah akun digital atau merchant yang terdaftar adalah indikator input, bukan outcome. Pemerintah dan platform dapat menyediakan dashboard sederhana yang membantu pemilik memahami unit economics sehingga pertumbuhan usaha lebih sehat.

Kasus 4 - Otomasi pabrik dan dilema produktivitas-upah

Sebuah pabrik mengadopsi robot dan AI vision untuk inspeksi kualitas. Produktivitas meningkat, cacat produk menurun, dan biaya per unit turun. Dari perspektif daya saing, keputusan ini rasional. Namun sebagian pekerja pemeriksa manual kehilangan tugas. Jika perusahaan memilih pemutusan hubungan kerja tanpa transisi, produktivitas perusahaan naik tetapi kesejahteraan sekelompok rumah tangga turun tajam. Dalam skala besar, otomasi semacam ini dapat menghasilkan pertumbuhan tanpa perluasan employment yang memadai.

Alternatif manajemen yang lebih adaptif adalah workforce transition. Sebelum implementasi teknologi, perusahaan memetakan task yang hilang, task baru, dan kompetensi yang dibutuhkan. Sebagian pekerja dilatih menjadi operator robot, teknisi, quality analyst, atau data annotator. Program pelatihan dirancang bersama vendor dan lembaga vokasi. Pekerja yang tidak dapat diredeploy mendapat dukungan transisi dan akses layanan penempatan kerja. Kebijakan publik dapat memberi insentif pajak untuk reskilling terverifikasi, bukan sekadar pembelian mesin.

Kunci konsepnya adalah bahwa teknologi harus dilihat sebagai faktor yang mengubah pembagian surplus. Jika keuntungan produktivitas hanya menjadi return to capital, ketimpangan dapat naik. Jika sebagian surplus digunakan untuk upah, pelatihan, harga yang lebih rendah, dan investasi baru, manfaat menyebar lebih luas. Karena itu tata kelola teknologi dan hubungan industrial menjadi bagian dari agenda kesejahteraan.

Kasus 5 - Pangan murah versus pendapatan petani

Pemerintah menghadapi tekanan ketika harga beras naik. Konsumen kota menuntut stabilisasi, sementara petani berharap harga gabah cukup tinggi untuk menutup biaya dan memberi keuntungan. Jika pemerintah hanya fokus pada harga konsumen, impor besar dapat menekan harga produsen. Jika

hanya fokus pada petani, pembatasan pasokan dapat menaikkan inflasi pangan. Dilema ini menunjukkan bahwa kesejahteraan produsen dan konsumen harus dianalisis dalam satu rantai nilai.

Solusi struktural adalah menurunkan biaya per unit melalui benih unggul, irigasi, mekanisasi, informasi cuaca, asuransi, kredit, dan pengurangan kehilangan pascapanen. Gudang dan drying facility meningkatkan posisi tawar petani karena mereka tidak harus menjual segera saat panen. Transparansi harga dan kontrak dengan pembeli dapat mengurangi asimetri informasi. Infrastruktur logistik menekan perbedaan harga antardaerah. Dalam jangka menengah, produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan harga konsumen stabil tanpa menekan pendapatan petani.

Kasus pangan memperlihatkan bahwa kebijakan harga saja jarang cukup. Stabilitas yang berkelanjutan lahir dari produktivitas, kompetisi, dan logistik. Bantuan tunai atau subsidi sementara dapat digunakan saat guncangan, tetapi tidak menggantikan pembenahan supply chain. Dari sudut pandang manajemen, ini adalah persoalan end-to-end process, bukan sekadar intervensi pada titik akhir pasar.

Kasus 6 - Pertumbuhan pariwisata dan carrying capacity sosial

Sebuah destinasi wisata dapat mengalami lonjakan kunjungan, pembangunan hotel, dan pertumbuhan pendapatan daerah. Namun jika tenaga kerja lokal hanya mengisi posisi berupah rendah, harga tanah melonjak, air bersih menjadi langka, dan budaya lokal berubah menjadi komoditas, masyarakat dapat merasakan ambivalensi. Pertumbuhan pariwisata berhasil secara statistik tetapi menimbulkan biaya sosial dan ekologis. Dalam jangka panjang, destinasi bahkan dapat kehilangan daya tarik karena overtourism.

Model pariwisata berkelanjutan menempatkan local value capture sebagai indikator penting. Pemerintah daerah dapat mendorong kepemilikan lokal, homestay berstandar, supplier lokal untuk hotel, pelatihan bahasa dan hospitality, serta pembatasan pembangunan di area rentan. Retribusi atau pajak dapat diarahkan untuk konservasi, air bersih, pengelolaan sampah, dan transportasi. Data carrying capacity membantu menentukan batas kunjungan pada periode tertentu. Dengan desain ini, pertumbuhan kunjungan tidak menjadi satu-satunya KPI.

Kasus ini menunjukkan prinsip umum artikel: setiap mesin pertumbuhan memiliki distribusi manfaat dan eksternalitas. Manajemen pembangunan yang baik harus mengukur keduanya. Pertumbuhan yang tampak lebih lambat tetapi menjaga aset alam, kepemilikan lokal, dan kualitas hidup dapat menghasilkan kesejahteraan jangka panjang yang lebih tinggi daripada pertumbuhan eksplosif yang menguras sumber daya.

23. Pertanyaan Kritis yang Perlu Terus Diajukan

Pertanyaan pertama adalah: apakah pendapatan median tumbuh sejalan dengan PDB per kapita? Pertanyaan ini penting karena rata-rata dapat ditarik ke atas oleh kenaikan pendapatan kelompok berpendapatan tinggi. Jika PDB per kapita meningkat tetapi pendapatan median stagnan, manfaat pertumbuhan belum menyebar secara proporsional. Pemerintah perlu mempublikasikan indikator pendapatan dan konsumsi median secara lebih rutin, termasuk menurut wilayah dan kelompok umur. Hal ini akan membantu publik memahami hubungan antara pertumbuhan nasional dan pengalaman rumah tangga di tengah distribusi.

Pertanyaan kedua adalah: apakah pekerjaan baru memiliki produktivitas dan upah yang lebih baik daripada pekerjaan yang digantikan? Jumlah pekerjaan bersih penting, tetapi kualitas transisi lebih penting untuk mobilitas sosial. Ekonomi yang menciptakan satu juta pekerjaan berupah rendah mungkin tidak menghasilkan peningkatan kesejahteraan sebesar ekonomi yang menciptakan lebih sedikit pekerjaan tetapi dengan produktivitas, perlindungan, dan peluang karier yang jauh lebih baik. Karena

itu data pasar kerja perlu melacak transisi individu antarpekerjaan, perubahan upah riil, dan lama waktu untuk naik kelas pekerjaan.

Pertanyaan ketiga adalah: apakah biaya hidup strategis tumbuh lebih cepat daripada pendapatan? Inflasi umum dapat terkendali, tetapi biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi dapat meningkat terus. Untuk kelas menengah muda, empat pos ini menentukan keputusan besar sepanjang siklus hidup. Dashboard kesejahteraan sebaiknya menghitung affordability ratios, misalnya rasio harga rumah terhadap pendapatan, rasio biaya transportasi terhadap gaji, dan proporsi pengeluaran pendidikan serta kesehatan. Indikator seperti ini lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari daripada indeks harga agregat semata.

Pertanyaan keempat adalah: apakah kelompok rentan memiliki perlindungan yang cukup ketika terjadi shock? Kemajuan kesejahteraan akan rapuh bila satu kejadian dapat menghapus hasil bertahun-tahun. Rumah tangga membutuhkan tabungan, asuransi kesehatan, perlindungan kerja, akses kredit yang tidak predatoris, dan bantuan sosial yang responsif. Pemerintah dapat mengembangkan indikator resilience yang mengukur kapasitas rumah tangga bertahan selama satu sampai tiga bulan tanpa pendapatan. Ukuran tersebut berguna untuk mendeteksi kelompok yang tidak miskin saat ini tetapi berisiko tinggi jatuh ke kemiskinan.

Pertanyaan kelima adalah: apakah pertumbuhan memperbesar atau memperkecil kesempatan antargenerasi? Pembangunan yang benar-benar berhasil membuat latar belakang keluarga semakin kurang menentukan masa depan anak. Ukurannya dapat berupa perbedaan learning outcomes menurut status sosial ekonomi, peluang masuk perguruan tinggi, akses pekerjaan formal, kepemilikan rumah pertama, dan mobilitas pendapatan antargenerasi. Jika anak dari keluarga berpendapatan rendah masih menghadapi hambatan struktural yang besar, pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif. Kebijakan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi harus dilihat sebagai paket mobilitas sosial.

Pertanyaan keenam adalah: seberapa besar manfaat pertumbuhan yang bertahan setelah memperhitungkan kerusakan lingkungan dan deplesi sumber daya? PDB dapat meningkat ketika sumber daya dieksploitasi, tetapi kesejahteraan jangka panjang bisa menurun bila hutan, air, tanah, atau kualitas udara rusak. Green accounting dan natural capital accounting membantu memperluas ukuran kemajuan. Pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan bahwa keuntungan generasi sekarang tidak dibayar dengan hilangnya pilihan bagi generasi berikutnya. Karena itu keputusan investasi perlu memasukkan biaya eksternalitas dan risiko iklim.

Pertanyaan ketujuh adalah: apakah institusi mampu belajar dari kegagalan? Sistem kebijakan yang matang tidak menganggap setiap program harus dipertahankan karena alasan reputasi. Program yang tidak efektif perlu diperbaiki atau dihentikan. Evaluasi independen, pilot project, sunset clause, dan open data memungkinkan pembelajaran. Budaya birokrasi yang menghargai bukti akan lebih mampu mengubah pertumbuhan menjadi kesejahteraan karena sumber daya diarahkan pada intervensi yang benar-benar bekerja. Dalam manajemen, kemampuan menghentikan proyek yang gagal sama pentingnya dengan kemampuan memulai program baru.

Pertanyaan kedelapan adalah: bagaimana masyarakat dilibatkan dalam mendefinisikan kesejahteraan? Para ekonom dapat menyusun indikator, tetapi warga memiliki pengetahuan tentang kebutuhan lokal yang tidak selalu tertangkap data nasional. Di satu daerah, air bersih mungkin prioritas utama; di daerah lain, transportasi atau keamanan kerja. Partisipasi publik yang terstruktur dapat memperkaya diagnosis tanpa menjadikan kebijakan sekadar mengikuti opini sesaat. Kombinasi evidence dan voice memberi dasar yang lebih kuat bagi kebijakan yang legitimate dan tepat sasaran.

24. Catatan Akhir tentang Paradoks Pertumbuhan

Paradoks pertumbuhan dan kesejahteraan pada dasarnya muncul karena ekonomi adalah sistem distribusi sekaligus sistem produksi. Produksi menjawab pertanyaan berapa banyak nilai yang diciptakan; distribusi menjawab siapa yang menerima nilai tersebut; institusi menjawab bagaimana nilai dialokasikan; dan budaya serta ekspektasi memengaruhi bagaimana hasil itu dirasakan. Kebijakan yang hanya kuat pada sisi produksi dapat menghasilkan ketimpangan dan rasa keterasingan. Kebijakan yang hanya kuat pada distribusi tetapi lemah pada produksi dapat kehilangan basis pembiayaan. Tantangan pembangunan adalah menyatukan keduanya dalam sebuah siklus yang saling memperkuat: produktivitas mendorong pendapatan, pendapatan memperkuat permintaan dan penerimaan negara, penerimaan membiayai modal manusia dan infrastruktur, lalu modal manusia meningkatkan produktivitas berikutnya.

Dalam konteks Indonesia, peluang untuk membangun siklus tersebut tetap besar. Bonus demografi menyediakan tenaga kerja yang luas, urbanisasi menciptakan pasar besar, transformasi digital menurunkan biaya transaksi, dan kekayaan sumber daya membuka peluang industrialisasi. Namun seluruh keunggulan itu hanya menjadi kesejahteraan jika disertai kapasitas institusional. Kualitas sekolah, kepastian hukum, kompetisi usaha, tata kelola anggaran, kualitas pemerintah daerah, dan kemampuan perusahaan mengelola manusia merupakan faktor yang menentukan apakah potensi ekonomi berubah menjadi peningkatan taraf hidup. Dengan kata lain, masalah kesejahteraan bukan sekadar kekurangan sumber daya, melainkan kualitas mekanisme yang menghubungkan sumber daya dengan kehidupan warga.

Karena itu komunikasi publik tentang ekonomi juga harus berkembang. Pemerintah sebaiknya tidak hanya mengumumkan pertumbuhan, tetapi menjelaskan komposisinya, kontribusi pekerjaan, distribusi pendapatan, dan implikasi terhadap rumah tangga. Demikian pula kritik publik sebaiknya tidak berhenti pada penolakan angka makro, melainkan menggunakan data untuk menunjukkan di mana jalur transmisi terputus. Dialog yang berbasis data memungkinkan perdebatan bergerak dari slogan menuju desain kebijakan. Bagi perguruan tinggi, ini adalah ruang penting untuk berkontribusi melalui riset, evaluasi kebijakan, pendidikan publik, dan pengembangan solusi lokal yang dapat direplikasi.

Pada akhirnya, kesejahteraan adalah konsep yang sekaligus ekonomi, sosial, psikologis, dan moral. Ia berhubungan dengan pendapatan tetapi tidak berhenti pada pendapatan; berhubungan dengan konsumsi tetapi juga rasa aman; berhubungan dengan pekerjaan tetapi juga martabat; berhubungan dengan layanan publik tetapi juga kepercayaan; berhubungan dengan kesempatan individual tetapi juga struktur sosial. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan prasyarat penting, namun pembangunan memperoleh legitimasi ketika pertumbuhan menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi mayoritas. Di titik itulah pertanyaan rakyat 'di mana kesejahteraan?' mendapatkan jawaban bukan melalui retorika, melainkan melalui pengalaman nyata yang dapat dirasakan dari rumah tangga, tempat kerja, sekolah, rumah sakit, pasar, hingga ruang publik.

25. Indikator Praktis untuk Memantau Apakah Pertumbuhan Mulai Terasa

Pertama, pemerintah dapat memantau pertumbuhan pendapatan riil kelompok bawah dan menengah, bukan hanya rata-rata nasional. Indikator ini perlu dibandingkan dengan perubahan biaya kebutuhan strategis. Jika pendapatan riil median meningkat secara konsisten selama beberapa tahun, sementara beban perumahan, transportasi, dan pangan terkendali, maka pertumbuhan mulai diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih luas. Data semacam ini juga membantu membedakan antara pemulihan sementara akibat transfer dan perbaikan struktural yang bersumber dari produktivitas serta kualitas pekerjaan.

Kedua, kualitas pasar kerja dapat dilihat dari kombinasi formalitas, produktivitas, jam kerja, stabilitas kontrak, kepesertaan jaminan sosial, dan peluang peningkatan keterampilan. Penurunan pengangguran sebaiknya dibaca bersama penurunan underemployment dan peningkatan proporsi pekerja dengan pendapatan kelas menengah. Dengan pendekatan ini, keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan tidak lagi diukur semata dari banyaknya orang yang bekerja, tetapi dari meningkatnya kemungkinan seseorang membangun karier, tabungan, dan aset dari pekerjaannya.

Ketiga, indikator layanan publik harus mengukur pengalaman pengguna. Waktu tunggu layanan kesehatan, hasil belajar, ketepatan waktu transportasi, kualitas air, akses internet, dan keamanan lingkungan dapat dikumpulkan secara berkala. Ketika kualitas layanan publik meningkat, rumah tangga memperoleh manfaat ekonomi yang sering tidak terlihat dalam data pendapatan. Penghematan waktu dan biaya, pengurangan risiko kesehatan, serta meningkatnya kualitas pendidikan merupakan komponen kesejahteraan yang nyata. Data pengalaman pengguna juga mendorong birokrasi lebih responsif terhadap outcome.

Keempat, mobilitas sosial perlu menjadi indikator jangka panjang. Pemerintah dan perguruan tinggi dapat membangun panel data untuk menilai apakah anak dari keluarga berpendapatan rendah memiliki peluang yang meningkat untuk mencapai pendidikan tinggi, pekerjaan formal, pendapatan yang lebih baik, dan kepemilikan aset. Jika mobilitas membaik, masyarakat akan melihat bahwa pertumbuhan membuka jalan kemajuan. Jika tidak, frustrasi dapat tumbuh karena orang merasa sistem ekonomi hanya memperbesar keuntungan mereka yang sudah memiliki modal. Indikator mobilitas memberi dimensi keadilan yang tidak dapat ditangkap oleh angka pertumbuhan tahunan.

26. Epilog: Kesejahteraan sebagai Ukuran Legitimasi Pembangunan

Sebuah perekonomian memperoleh legitimasi sosial ketika masyarakat melihat hubungan yang masuk akal antara kerja, usaha, kontribusi, dan hasil yang mereka terima. Apabila orang bekerja lebih produktif tetapi merasa tidak pernah mampu mengejar biaya hidup, kepercayaan terhadap sistem akan menurun. Karena itu kebijakan kesejahteraan pada akhirnya juga merupakan kebijakan legitimasi. Pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa peningkatan produktivitas tidak berhenti pada laporan keuangan atau statistik nasional, melainkan hadir dalam bentuk kesempatan yang lebih luas, upah yang lebih baik, layanan yang lebih bermutu, dan risiko kehidupan yang lebih dapat dikelola.

Dalam perspektif jangka panjang, pertumbuhan yang paling berharga adalah pertumbuhan yang memperkuat kapasitas manusia dan institusi sehingga masyarakat menjadi lebih tangguh menghadapi perubahan. Dunia akan terus berubah karena AI, geopolitik, iklim, demografi, dan pergeseran rantai pasok. Tidak ada kebijakan yang dapat menghilangkan ketidakpastian, tetapi negara dapat memperbesar kemampuan warga untuk beradaptasi. Pendidikan yang baik, perlindungan sosial portabel, pasar kerja dinamis, layanan kesehatan yang kuat, akses modal, dan institusi yang dipercaya membentuk resilience tersebut. Ketika masyarakat memiliki kapasitas beradaptasi, pertumbuhan tidak hanya meningkatkan konsumsi hari ini, tetapi memperluas kemungkinan hidup pada masa depan.

Karena itu, agenda kesejahteraan membutuhkan konsistensi lintas periode pemerintahan. Banyak hasil penting - kualitas pembelajaran, produktivitas tenaga kerja, kesehatan anak, transformasi industri, dan mobilitas sosial - baru tampak setelah bertahun-tahun. Kebijakan yang berubah terlalu cepat karena siklus politik membuat investasi manusia kehilangan kontinuitas. Diperlukan kesepakatan nasional mengenai sasaran jangka panjang yang dapat dipertahankan meskipun instrumen kebijakannya menyesuaikan keadaan. Pertumbuhan yang inklusif bukan proyek satu kementerian atau satu masa jabatan, melainkan proses institusional yang menghubungkan negara, pasar, masyarakat, dan generasi. Bila konsistensi ini terjaga, pertanyaan tentang kesejahteraan dapat dijawab melalui tren yang nyata:

pendapatan riil meningkat, pekerjaan makin produktif, ketimpangan kesempatan menyempit, layanan publik membaik, dan rumah tangga lebih tahan menghadapi guncangan. Itulah makna pembangunan yang berorientasi pada manusia.

Dengan kerangka tersebut, evaluasi pembangunan dapat bergerak dari perdebatan simbolik menuju pembuktian empiris. Setiap keberhasilan pertumbuhan perlu diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah rumah tangga lebih aman, apakah pekerja lebih produktif dan lebih sejahtera, apakah anak memperoleh peluang yang lebih baik, dan apakah layanan publik mengurangi beban hidup? Bila jawabannya semakin sering 'ya', maka pertumbuhan telah berubah menjadi kesejahteraan. Bila tidak, kebijakan harus diperbaiki tanpa menyangkal capaian yang sudah ada. Inilah semangat utama artikel ini: menghubungkan angka makro dengan kualitas hidup secara disiplin, adil, dan berorientasi masa depan.

Dengan demikian, pertumbuhan dan kesejahteraan harus diperlakukan sebagai satu agenda pembangunan terpadu yang diukur secara terbuka, konsisten, multidimensi, dan berorientasi pada manusia.

Glossarium

Disposable income: Pendapatan rumah tangga yang tersisa setelah pajak dan transfer, tersedia untuk konsumsi atau tabungan.

Financial resilience: Kemampuan rumah tangga bertahan menghadapi guncangan pendapatan atau pengeluaran tanpa jatuh ke kesulitan berat.

Gini ratio: Ukuran ketimpangan distribusi dengan nilai 0 berarti pemerataan sempurna dan 1 berarti ketimpangan maksimum secara teoritis.

Good jobs: Pekerjaan produktif dengan pendapatan layak, stabilitas, perlindungan, dan peluang pengembangan keterampilan.

Inclusive growth: Pertumbuhan yang memperluas partisipasi dan manfaat ekonomi secara luas, khususnya melalui kesempatan produktif.

Living wage: Tingkat upah yang memungkinkan pekerja dan keluarganya memenuhi standar hidup layak sesuai konteks biaya hidup.

Median income: Pendapatan orang atau rumah tangga yang berada tepat di tengah distribusi; sering lebih representatif daripada rata-rata.

PDB: Produk Domestik Bruto, nilai tambah barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam wilayah ekonomi pada periode tertentu.

PDB per kapita: PDB dibagi jumlah penduduk; indikator rata-rata kapasitas ekonomi per orang, bukan pendapatan aktual setiap individu.

Productivity: Output yang dihasilkan per unit input, misalnya per pekerja atau per jam kerja.

Real wage: Upah nominal yang telah disesuaikan dengan perubahan tingkat harga sehingga menggambarkan daya beli.

Social wage: Nilai layanan publik dan perlindungan sosial yang meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di luar pendapatan tunai.

Underemployment: Kondisi pekerja yang bekerja lebih sedikit daripada jam yang diinginkan atau berada pada pekerjaan yang kurang memanfaatkan kapasitasnya.

Upward mobility: Pergerakan individu atau keluarga menuju posisi ekonomi dan sosial yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya atau generasi sebelumnya.

Daftar Pustaka

Catatan: DOI dicantumkan untuk referensi yang memiliki DOI. Dokumen statistik dan laporan institusional yang tidak memiliki DOI ditulis sesuai kaidah APA 7 tanpa DOI.

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown.
- Alesina, A., Di Tella, R., & MacCulloch, R. (2004). Inequality and happiness: Are Europeans and Americans different? *Journal of Public Economics*, 88(9-10), 2009-2042.
<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.07.006>
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674287013>
- Badan Pusat Statistik. (2026a). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026b). *Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen*. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026c). *Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368*. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026d). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen; rata-rata upah buruh sebesar 3,39 juta rupiah*. BPS-Statistics Indonesia.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2007). The economic lives of the poor. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 141-167. <https://doi.org/10.1257/jep.21.1.141>
- Deaton, A. (2008). Income, health, and well-being around the world: Evidence from the Gallup World Poll. *Journal of Economic Perspectives*, 22(2), 53-72. <https://doi.org/10.1257/jep.22.2.53>
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. *Journal of Economic Growth*, 7, 195-225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>
- Fleurbaey, M. (2009). Beyond GDP: The quest for a measure of social welfare. *Journal of Economic Literature*, 47(4), 1029-1075. <https://doi.org/10.1257/jel.47.4.1029>
- International Labour Organization. (2024). *World employment and social outlook: Trends 2024*. ILO.
- Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(38), 16489-16493.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1011492107>
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- Milanovic, B. (2016). *Global inequality: A new approach for the age of globalization*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674969797>
- OECD. (2020). *How's life? 2020: Measuring well-being*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9870c393-en>
- Piketty, T., & Saez, E. (2003). Income inequality in the United States, 1913-1998. *Quarterly Journal of Economics*, 118(1), 1-39. <https://doi.org/10.1162/00335530360535135>
- Ravallion, M. (2016). *The economics of poverty: History, measurement, and policy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190212766.001.0001>
- Rodrik, D. (2013). Unconditional convergence in manufacturing. *Quarterly Journal of Economics*, 128(1), 165-204. <https://doi.org/10.1093/qje/qjs047>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

World Bank. (2026). Indonesia economic prospects: Managing risks, unlocking productivity. World Bank.

World Bank. (2025). Indonesia economic prospects: Digital foundations for growth. World Bank.

Wilkinson, R. G., & Pickett, K. E. (2009). Income inequality and social dysfunction. *Annual Review of Sociology*, 35, 493-511. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-070308-115926>

Wolff, E. N. (2017). *A century of wealth in America*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674981362>

Catatan Teknis

Naskah ini disusun sebagai artikel akademik panjang dengan struktur naratif-komprehensif. Perkiraan jumlah kata isi dokumen (termasuk judul, tabel, glossarium, dan daftar pustaka) adalah sekitar 20,003 kata sebelum finalisasi tata letak.